

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TIMOR LESTE TERHADAP INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kebijakan luar negeri Timor Leste terhadap Indonesia paska disahkan sebagai sebuah negara berdaulat, mencatat sejarah-sejarah hubungan harmonis kedua negara paska merdeka tahun 2002, salah satu kebijakan luar negeri Timor Leste terhadap Indonesia khususnya di bidang pendidikan, Timor Leste memutuskan untuk melakukan kerja sama secara intensif dengan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan, guna memperbaiki dan membangun sumber daya manusia Timor Leste yang masih kurang dalam ilmu pengetahuan untuk mengelola sistem pendidikan di Timor Leste terutam dalam mengeksplorasi sumber daya alam untuk mendukung ekonomi domestik.

A. Sejarah Hubungan Timor Leste Dengan Indonesia

Indonesia dan Timor Leste mencatat sejarah panjang dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintahan kedua negara, kedudukan Indonesia atas Timor-Timur sejak tahun 1975 sampai tahun 1999, banyak sekali kisah yang telah ditorehkan oleh kedua masyarakat. Namun sejarah hubungan kedua negara merupakan landasan kerja sama pembangunan manusia di bidang pendidikan yang dimana Timor Leste saat ini sangat membutuhkan peran serta Indonesia untuk memperbaiki sumber daya manusia Timor

Leste di segala ilmu pengetahuan dalam pendidikan global kontemporer.

Timor Leste membuka kembali hubungan kerja sama dengan Indonesia¹ Paska merdeka, hal ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri Timor Leste layaknya negara berdaulat.² Timor Leste mulai ikut menjaga kesinambungan politik internasional khususnya kawasan regional yang aman dan kooperatif melalui hubungan baik dengan Indonesia.

pemantapan peran politik luar negeri dan kerja sama internasional antara lain adalah membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara di kawasan Asia tenggara, Eropa, Amerika dan Afrika. Timor Leste sedang dalam membangun kepentingan nasional memfokuskan komitmen terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN sejak tahun 2005, dan menegaskan pentingnya memelihara kebersamaan, multilateralisme, saling pengertian dan perdamaian dalam politik hubungan internasional.

Kemudian politik luar negeri menurut ahli hubungan internasional dapat diartikan sebagai konsekuensi upaya negara dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu, melindungi dan mensejahterakan rakyatnya.³ Menurut Hoslti politik luar negeri merupakan rumusan konkret yang berasal dari gabungan antara

¹Gustii Ayu Agustina Rizki, the diplomacy of timor leste - indonesia in human right settlement: from multilateral to bilateral, Jember Januari 2011, Hal 62-67

² Hastutining Dyah Wijyatmi, Hubungan Bilateral RI-Timor-Timur Paska Kemerdekaan, Surakarta 2014, Hal 69,71-80

³ Andi Purnomo, Pro kontra kehadiran Mega Timor-timur, dalam suara merdeka Mei 2002

kepentingan nasional, situasi internasional yang berlaku serta kekuatan negara. Sehingga politik luar negeri menunjukkan bahwa tindakan atau ide yang dirancang oleh para pembuat kebijakan untuk memecahkan suatu masalah atau melancarkan perubahan lingkungan, baik sikap kebijakan dan tindakan nyata.⁴ Dengan demikian, peran Timor Leste semakin besar seiring berkembangnya negara baru tersebut dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta secara bertahap memulihkan citra Timor Leste dan Indonesia atas kepercayaan masyarakat internasional paska kemerdekaan tahun 2002.

Sejalan dengan pembentukan kebijakan luar negeri, dalam mendorong kerja sama untuk menyeimbangkan kekuatan dari tatanan dunia diperlukan perluasan fungsi jaringan dan peningkatan efektivitas kerja sama, demi membangun kembali solidaritas dengan Indonesia khususnya di bidang politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya kerja sama bilateral yang lebih solid serta peningkatan kerja sama internasional dalam lingkaran regional.

upaya penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antaraktor negara dan aktor nonnegara (*masyarakat dan dunia usaha*) maupun antaraktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri dan kerja sama internasional khususnya kerja sama bilateral dengan negara-

⁴ Holsti, K. J, International politics : a framework for analysis. (Kalevi Jaakko), 1935, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1977

negara tetangga seperti, Indonesia, Australia dan Papua Nugini. Peranan politik luar negeri dan kerja sama internasional terus ditingkatkan untuk mampu mengembangkan pilihan-pilihan dan menopang keinginan hidup damai, sejahtera, dan bermartabat di dalam negeri. Timor Leste membuka diri kepada negara-negara lain dan mampu menghadapi perubahan pergaulan internasional. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses menjalin hubungan kerja sama merupakan bangkitnya jiwa nasionalis dan patriotis untuk mewujudkan mimpi bangsa dan masyarakat yaitu menuju kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil yang dicapai tentu saja dapat dicatat sebagai hasil dari suatu kerja keras dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan peran Timor Leste dalam politik luar negeri dan kerja sama internasional yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara. Sebagaimana diketahui bersama, pembentukan pemerintahan pertama tahun 2002 berlangsung aman dan damai melalui suatu pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dan demokratis dari tingkat desa sampai nasional. Proses demokratisasi yang tercermin pada rangkaian pelaksanaan pemilu tahun 2002 itu, diakui sebagai tahapan membangun demokrasi di Timor Leste serta mengimplementasikan prinsip dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan hukum domestik.⁵

⁵ Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste , Asas-asas Dasar, Pasal 1 no.1, tahun 2002

Pesta demokrasi itu membuat Timor Leste mampu menyerap perhatian masyarakat internasional dan memberikan legitimasi baru sebagai salah satu negara demokrasi di kawasan Asia Tenggara maupun di dunia. Keberhasilan pesta demokrasi itu sekaligus menguatkan modalitas Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka dan demokrasi untuk mampu menguatkan kebijakan-kebijakannya luar negerinya yang tepat dalam menghadapi politik global kontemporer .

Hubungan bilateral antara Timor Leste dengan Indonesia telah berlangsung belum cukup lama, kedua negara inipun telah mengembangkan kerja sama diberbagai bidang baik ekonomi, politik, budaya, keamanan dan juga pendidikan. sebagai bukti akan terlihat banyaknya jalinan kerja sama antara kedua negara ini pada tanggal 13 Oktober 2014,⁶ dimana kedua negara mendatangi perjanjian kerja sama di Jakarta, dan dibukanya hubungan diplomatik secara resmi. Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Komisi Bersama Timor Leste – Indonesia (*Joint Commission Timor Leste Indonesia*)⁷ sebagai tindak lanjut memorandum kesepahaman mengenai kerja sama bilateral yang ditandatangani antara Pemerintah RI dan Timor Leste pada saat kunjungan Presiden Xanana Gusmao ke Jakarta bulan Juli 2002, yang diselenggarakanya pada tanggal 7-8 Oktober 2002. Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Luar Negeri saat itu adalah Hassan

⁶http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8232&Itemid=26, diakses pada tanggal 12 Oktober 2017

⁷ <https://reliefweb.int/report/indonesia/joint-statement-first-meeting-indonesia-timor-leste-joint-ministerial-commission> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

Wirayuda, dan delegasi Timor Leste dipimpin oleh menteri luar negeri Timor Leste Jose Ramos Horta. Komisi Bersama ini bertujuan membahas berbagai upaya peningkatan hubungan bilateral, termasuk masalah residual yang belum terselesaikan sebagai konsekuensi berdirinya Timor Leste sebagai negara berdaulat.⁸

Timor Leste adalah negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang bukan anggota dari regional ASEAN, juga belum menjadi observer dalam organisasi ini paska berdaulat bulan Mei tahun 2002 , namun kemudian, setelah sistem pemerintahan dibentuk dengan dasar hukum konstitusi *Republik Demokratik Timor Leste* (RDTL), Timor Leste mulai menyatakan sikapnya untuk menjadi observer terhadap ASEAN pada Juli 2002.⁹

Sebagai negara berdaulat, Timor Leste mulai menata kehidupan seperti sebuah negara baru, layaknya bayi yang baru lahir, yang belum bisa berjalan, hanya bisa merayap, apalagi mencari makanan bagi kebutuhannya sendiri. Bayi yang dibantu, didorong dan dipelihara oleh tetanga lain, akhirnya bisa tumbuh besar, analogi tersebut dapat mengabarkan bagaimana pertumbuhan sebuah negara yang baru merdeka mau tidak mebuca diri dan membentuk banyak kerja sama di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Misi internasional UNTAET yang berada dibawah naungan PBB, yang membantu untuk melatih bagaimana cara berjalan dan mencari kebutuhan

⁸ Suara merdeka, Jakarta 3 Juli 2002

⁹ Alarico da Costa, pesquisa Dili Timor Leste 2008

untuk kehidupan sehari-hari.¹⁰ Oleh karena semua dukungan itu, sehingga terlahirlah konstitusi yaitu *Republik Demokratik Timor Leste* (RDTL), yang berfungsi untuk mengatur seluruh aspek kehidupan domestik. Konstitusi tahun 2002 adalah dasar hukum negara RDTL, yang menjadi regulator bagaimana negara menata masa depan, terutama melakukan politik luar negeri, kerja sama luar negeri agar dapat menyokong semua aspek kehidupan, terlebih di bidang ekonomi, pendidikan dan politik.

Pemerintahan pertama tahun 2002 yang terbentuk oleh kabinet berasal dari partai politik FRETILIN.¹¹ Presiden terpilih saat itu adalah bapa pejuang resistensi, Kay Rala Xanana Gusmão, Perdana Menteri dipilih oleh parati mayoritas parlemen yaitu Dr. Mari Alkatiri, Menteri luar negeri adalah Dr. Jose Ramos Horta,¹² beliau merupakan penerima hadiah Nobel perdamaian oleh PBB pada tahun 1996. Atas pengalaman diplomatiknya selama 24 tahun silam, ia mendedikasikan karirnya dalam dunia politik internasional, yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sebagai seorang diplomat, yang memiliki pengaruh di luar negeri, terutama di dalam organisasi internasional seperti PBB, WHO, UNHCR, serta isu-isu HAM internasional dan lainnya sebagainya. Bahwa praktik diplomasi yang dibangun Timor Leste melalui Ramos Horta paska

¹⁰ Pidato Presiden I, Xanana Gusmão 20 Mei tahun 2002, Timor Leste ,Dili

¹¹ Presiden pertama RDTL, founding father 1975

¹² <http://ramoshorta.com/> , Novel peace prize, PBB , 1996, diakses pada tanggal 12 Juni 2017

kemerdekaan, dinyatakan membuka diri dan menata politik luar negerinya sesuai dengan situasi geopolitik kontemporer.

Agenda diplomasi terbuka merupakan strategi membangun politik luar negeri Timor Leste. Namun tetapi yang terpenting dikaji dalam bagian ini adalah, bagaimana ketika Ramos Horta memulai karir baru diplomasinya paska kemerdekaan untuk menetapkan politik luar negeri Timor Leste, serta kebijakan-kebijakan luar negeri terhadap negara tetangga seperti Indonesia, Australia dalam rangka mencapai kepentingan nasional.¹³

Sebagai menteri luar negeri pada pemerintahan pertama, beliau membawa Timor Leste untuk ikut serta dalam menjaga perdamaian konflik di dunia (*peace keeping*), yaitu negara-negara kawasan, Asia, Afrika, Amerika dan Eropa. Meskipun negara baru dan kecil, namun kedaulatan yang diakui secara de facto dan de jure, mendukung penuh Timor Leste untuk berkiprah di dunia internasional, seperti halnya perduli terhadap bencana alam di Haiti¹⁴, kelaparan di Somalia, mengirimkan pasukan perdamaian serta bantuan materi terhadap pemerintah Guine Bisau dan Angola untuk berkontribusi menjaga stabilitas politik domestik¹⁵. Kerja sama-kerja sama yang dibangun tentu membawa dampak positif bagi Timor Leste sendiri, terutama

¹³ Ibid

¹⁴ [http://www.haitilibre.com/en/news-7143-haiti-politic-the-east-timor-donated-\\$1-million-to-haiti.html](http://www.haitilibre.com/en/news-7143-haiti-politic-the-east-timor-donated-$1-million-to-haiti.html) , diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

¹⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2013/01/01/14070430/Ramos.Horta.Jadi.Utusan.PBB.untuk.Guinea-Bissau>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2017

berkontribusi dalam menjaga Geopolitik dalam era globalisasi. Praktik diplomasi yang dilaksanakan negara RDTL dalam hubungan kerja sama luar negeri, terutama diplomasi terbuka dalam kawasan, dapat memberikan peluang bagi RDTL untuk menata dan memperluas jaringan kerja sama internasional, dalam bidang ekonomi, pendidikan dan politik untuk mencapai tujuan nasional itu sendiri.

Hubungan kerjasama RI-RDTL pasca kemerdekaan, merupakan salah satu agenda diplomasi RDTL, bagaimana dapat memulihkan kembali kondisi psikologi politik selama 24 tahun hingga jajak pendapat. Pihak NKRI juga memberikan kontribusi secara maksimal dengan hati yang lapang, sehingga hubungan bilateral kedua negara kembali baik dan begitu cepat, layaknya hubungan bilateral negara-negara lain, yang tentu saja saling menguntungkan kerja sama-kerja sama di seluruh aspek kehidupan masyarakatnya.¹⁶

Tidak hanya Indonesia, hubungan diplomasi dengan negara-negara lain juga direalisasikan, sesuai dengan UU politik luar negeri RDTL. Seperti yang ditetapkan dalam konstitusi RDTL pasal 8, dan pasal 87 tahun 2002, berorientasi pada seorang presiden untuk terus memantau para wakil duta besar yang ditugaskan di negara-negara lain, untuk bertindak dan mengambil sikap kerja sama maupun yang berhubungan dengan ancaman terhadap politik dan keamanan domestik, perlu

¹⁶ Hubungan bilateral Ri-Tim-Tim pasca kemerdekaan, Hastutining Diah Wijayati

konsultasi dengan pihak pemerintahan untuk mengambil suatu keputusan. Namun RDTL sendiri memiliki sebuah slogan kerja sama hubungan luar negeri Timor Leste yakni, “*halo amigo ba ema hotu-hotu, no la halo inimigo ba ema ida*”, yang artinya, *more friemdship zero enemy*. Slogan tersebut cenderung mendorong semangat para aktor negara maupun non-negara dalam menjalin hubungan kerja sama luar negeri, membuka jaringan kerja sama, seperti dijelaskan dalam ilmu hubungan internasional bahwa, transnasional diplomasi sangat penting dilakukan oleh sebuah negara, guna mempererat hubungan kerja sama yang telah dibina bersama, misalnya , Indonesia dan Timor Leste, bahkan membuka peluang kerja sama yang baru dengan negara-negara lain di kawasan yang berbeda.¹⁷

Situasi ekonomi global dewasa ini mengharuskan negara-negara membuka pasar mereka, yang berorientasi pada interdependensi serta globalisasi pendidikan, ekonomi, politik, sosial budaya, telah mendorong bangsa-bangsa untuk bekerja sama melalui konsep multidiplomasi. Bahwa negara harus memiliki tangun jawab kolektif dalam menjaga keamanan bersama. Tidak hanya dalam aspek keamanan politik, tetapi juga ekonomi dan sosial budaya, seperti aksi kemanusiaan, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), menjaga

¹⁷ Konstitusi RDTL tahun 2002, Dili Timor Leste

nilai-nilai demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia.¹⁸

Paska perang dunia II, jatuhnya Uni Soviet dan sekutu komunis, maka negara-negara kawasan mulai memikirkan untuk bekerja sama secara politik keamanan dan ekonomi untuk menghadapi situasi arus liberalisasi dan kapitalisasi yang dengan orientasinya yaitu, menguasai suatu negara yang lemah dengan modal ekonomi dan kekuatan militernya. Timor Leste yang merdeka pada era milenium yaitu abad ke-21, geopolitik dan ekonomi dunia yang telah bergeser dari kapitalis komunis ke kapitalis liberalis yang memaksakan setiap negara mampu bersaing dalam kerja sama-kerja sama internasional di bidang pertahanan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

Salah satu kebijakan luar negeri Timor Leste yang penting yaitu pada tahun 2007 Timor Leste menandatangani ASEAN Treaty on Amity and Co-operation, yang menandai bahwa diplomasi kawasan Timor Leste sedang berlangsung baik.¹⁹

Situasi geopolitik dan ekonomi, mendorong semua negara untuk mampu berkompetitif di dunia internasional, RDTL merupakan negara baru yang lahir di era milenium yaitu pada tahun 1999-2000, tetapi setelah diakui sebagai negara berdaulat pada tahun 2002, RDTL memulai karir diplomasi luar negerinya dengan membangun kerja sama-kerja sama internasional yang lebih berorientasi pada, penegakan hak asasi manusia, mendorong

¹⁸ Makarim Wibisono, tantangan diplomasi multilateral, hal 34

¹⁹ Alarico da Costa, pesquisa Dili 2008, Dili Timor Leste

hukum internasional dalam konsep *peace keeping*. Dan bantuan-bantuan humanitarian lainnya, yang dipercayai dapat ikut memulihkan keadaan ekonomi dan politik internasional, seperti bantuan untuk mengatasi perang di kawasan Afrika, sumbangsih Timor-leste ikut mendukung pemimpin lembaga internasional melalui sidang umum PBB, hal tersebut telah dilakukan oleh aktor negara dan non negara dari Timor Leste. Seperti Ramos Horta, yang memiliki power dan ketenarannya di kancah internasional, beliau mengatasnamakan individu maupun pemerintah RDTL, untuk meneriaki dengan suara lantang keras, untuk mengadili para aktor pelanggaran hak asasi manusia di manapun.

Disisi lain, Xanana yang dikenal sebagai founding father RDTL, serta pemimping yang berkarismatik tersebut, ikut melakukan manufer politik internasional, untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Konflik Cavo Verde misalnya, konflik yang tak berujung penyelesaiannya. Telah menyalang banyak korban jiwa, terutama anak kecil dan perempuan yang tidak tau menaungi politik yang menjadi agenda seting atau dikenal dengan perang ras tersebut. Xanana berupaya untuk mendatangi negara tersebut, dengan tujuang agar membawa damai kepada masyarakat dan kelompok yang ikut terlibat dalam penembakan dan terror. Bantuan humanitarian dan kehadiran beliau terealisasi dan akhirnya Cabo Verde dan Timor Leste sekarang justru menjaling hubungan kerja sama yang baik di

berbagai macam aspek kehidupan kedua masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Saat ini, pemerintah Timor Leste telah mengirim sejumlah pelajar untuk melanjutkan studinya di Cabo Verde melalui mekanisme kerja sama pemberian beasiswa.

Paska memisahkan diri dari NKRI, kedua negara menjalin kembali hubungan yang baik, dengan tujuan utama mengajak kedua masyarakat agar segera melupakan kejadian-kejadian di masa lalu yang menyimpannya, sehingga tidak terlarut dalam kebencian, dendam dan rasa kekecewaan kedua belah pihak. Untuk menata masa depan yang baik, saling mendukung dalam segala aspek kehidupan. Namun proses jalinan kerja sama tersebut bukanlah mudah, hal yang menjadi hambatan dalam negosiasi agar kembali dengan baik tersebut adalah, bagaimana melakukan rekonsiliasi, atau penerimaan kembali antara pemerintah dan masyarakat kedua negara.

Berkat bantuan dan perlindungan PBB, melalui *United Nation Transision Administration in East Timor* (UNTAET), sehingga proses rekonsiliasi yang diinginkan kedua negara berjalan dengan baik. Namun saat itu, walaupun masih ada beberapa insiden, seperti terjadi di Atambua tanggal 6 September tahun 2000²⁰, dan masalah pengungsi Timor-Timur yang pro integrasi NKRI menjadi kendala besar menuju proses rekonsiliasi, tetapi sang Maha Kuasa berpihak pada pemimping

²⁰ Makarim Wibisono, tantangan diplomasi multilateral, hal 246

kedua negara, sehingga terus berupaya dengan tulus hati dan komitmen tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Maka lahirlah dua lembaga menuju puncak rekonsiliasi, yaitu, *Komisi Penerimaan Kebenaran Dan Rekonsiliasi (CAVR)*, dan *Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP)*. Dua lembaga tersebut difasilitasi oleh PBB melalui administrator transisi Sergio Vieira de Melo pada masa UNTAET. Kepercayaan penuh dengan mandat dan ketentuan yang diberikan kepada CAVR melalui komisarisnya untuk menjalankan tugas dan mencari kebenaran dan fakta, demi membangun kembali hubungan yang harmonis antara kedua negara. Tentu saja *komisi kebenaran dan persahabatan (KKP)* juga memiliki visi misi yang sama dengan CAVR yaitu, saling menerima, menegosiasikan dengan ikhlas dan tulus, sehingga dapat memfasilitasi proses rekonsiliasi berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan keinginan. Dalam kongres pertama partai CNRT dapat menetapkan visi CAVR sebagai berikut:

Rekonsiliasi adalah sebuah proses, yang mengakui kesalahan masa lalu termasuk penyesalan dan pemberian maaf, sebagai hasil dari sebuah jalan yang tidak terpisahkan dari proses pencapaian keadilan; rekonsiliasi adalah juga sebuah proses yang harus melibatkan Rakyat Timor-Leste, sehingga lingkaran saling tuduh menuduh bisadiputus. Proses ini tidak bisa dipandang hanya sebagai sebuah upaya penyelesaian konflik, atau sekedar alat politik yang bermaksud untuk

*menenangkan dan mengintegrasikan kembali individu-individu atau kelompok-kelompok dalam konteks penerimaan mereka terhadap kemerdekaan and kedaulatan Timor-Leste, namun, yang utama, harus dilihat sebagai sebuah proses dimana kebenaran harus menjadi hasilnya.*²¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa, Timor Leste mengawali diplomasi dengan membangun, memulihkan kembali hubungan yang telah diperparah oleh situasi politik dan konflik yang melanda kedua negara selama 24 tahun silam. Pembuktian dalam menjaling hubungan bilateral NKRI-RDTL, menjadi fenomena diplomasi bagi negara-negara lain, dan menjadi landasan serta acuan untuk lebih baik menjaga kerja sama, saling menerima dari pada membiarkan semakin parah akhirnya berpotensi perang fisik. RDTL menyadari negara kecil dan baru diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa dan Amerika, terutama kesadaran ini memberi dampak positif untuk lebih sabar dan terus mencari jalan keluar untuk menciptakan kerja sama-kerja sama yang baru dan beruntung.

Kerja sama sektor pendidikan yang dilakukan negara kecil ini, masih dikatakan baru, mengingat teritori RDTL yang sebesar suatu propinsi di negara besar seperti Amerika dan negara Eropa lainnya. Kekurangan sumber daya manusianya, merupakan salah satu faktor penghambat RDTL untuk berdiplomasi secara besar atau yang dikenal dengan multi track diplomasi. Namun hal itu

²¹ <http://www.cavr-timorleste.org/in/CAVR.htm>, diakses pada tanggal 15 Juni 2017

tidak juga menjadi tolak ukur untuk membatasi pergerakan diplomasi Timor Leste. Justru kekurangan-kekurangan yang dihadapi saat ini, menjadi semangat bagi aktor negara non negara, terutama bagi generasi penerus bangsa untuk membuka diri terhadap negara-negara di kawasan lain untuk menjalin kerja sama di aspek vital, meliputi, diplomasi ekonomi, pendidikan, budaya dan juga berorientasi kepada diplomasi perorangan (*people to people diplomacy*).

B. Kebijakan Luar Negeri Di Bidang Ekonomi

Pemerintah RDTL meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia guna memberikan kontribusi terhadap ekonomi domestik, setelah RDTL disahkan sebagai sebuah negara berdaulat pemerintah Timor Leste langsung mengirim diplomatiknya ke Jakarta. Orientasi politik luar negeri Timor Leste terhadap Indonesia khususnya di bidang ekonomi dinilai sangat efektif, yaitu memberikan wewenang dan kebebasan kepada semua aktor untuk berani melakukan hubungan-hubungan diplomasi secara, kelompok, individu maupun lembaga pemerintahan. Politik luar negeri RI yang dikenal dengan Politik bebas aktif, telah memberikan dukungan dan jaminan kerja sama dengan negara pemerintah RDTL. Politik luar negeri RDTL seperti yang dikutip dalam kajian : Diplomasi Timor Leste di ASEAN (*Alarico da Costa*), dengan slogan “belun ho ema hotu labele halo inimigo ho ema ida”,

artinya, bersahabatlah dengan semua orang, tidak boleh memusuhi seorangpun.²²

Orientasi politik luar negeri RDTL terhadap Indonesia telah menguntungkan dan semakin angsur memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat Timor Leste. Tahun 2014, pemerintah RDTL melalui kementerian industry dan perdagangan menyepakati sebuah kerja sama di bidang ekonomi dengan Indonesia, yang telah dinyatakan dalam satu MoU, yaitu sebuah nota kesepahaman yang mengikat. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2014, Badan standarisasi (BSN) RI, dengan Kementerian Perdagangan, Industri dan Lingkungan hidup Timor Leste atau Ministro comercio Industria I Ambiente (MCIA), yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Bambang Prasetya, M, Sc selaku kepala badang standarisasi nasional, dan Dr. Filipus Nino Pereira selaku sekretaris negara perindustrian dan koperasi RDTL. Kesepakatan kerja sama tersebut mencakup beberapa hal dalam bidang standarisasi antara lain:²³

1. Pertukaran informasi untuk kepentingan bersama yang mencakup, tapi tidak terbatas pada:
 - a) Produk yang diperdagangkan antara kedua negara, termasuk di dalamnya, daftar produk standar, regulasi teknis, prosedur penilaian kesesuaian, dan informasi

²² ALarico da Costa, Diplomasi Timor Leste di ASEAN, Dili Timor Leste

²³Memorandum saling pengertian antara badang standarisasi nasional RI dengan menteri perdagangan dan perindustrian RDTL. Jakarta 15 Agustus 2014, dalam bahasa Indonesia

lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dari produk-produk tersebut

- b) Katalog Standar Nasional dan publikasi penilaian kesesuaian
- 2. Partisipasi pada konferensi, simposium, workshop, pameran dan pertemuan lainnya yang diorganisasi oleh salah satu pihak
- 3. Penyelenggaraan kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian saling pengakuan di bidang penilaian kesesuaian
- 4. Fasilitasi bantuan peningkatan kapasitas teknis di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian, kepada salah satu pihak berdasarkan permintaan dengan lingkup bantuan teknis yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat beberapa pengaturan teknis, untuk mengatur dan memfasilitasi kerja sama, terdapat pengaturan pendanaan oleh personil dari kedua belah pihak. Dalam MoU tersebut berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi, selalu koordinasi dalam membuka dokumen yang berkaitan dengan isi perjanjian. Masa berlaku MoU tersebut dalam waktu 3 tahun, dan dapat diperpanjang secara otomatis sekali dalam 3 tahun berikutnya, dengan kesepakatan dari kedua pihak melalui *jalur atau mekanisme diplomasi*, kecuali salah satu pihak ingin mengakhiri MoU ini, harus dengan mengirimkan surat kepada pihak lain dalam

waktu 6 bulan sebelum masa berlaku selesai. Adapun tujuan tertentu dari kerja sama ini adalah:

1. untuk mendukung peningkatan Kerja sama ekonomi antar kedua negara melalui fasilitasi perdagangan dengan mengeliminasi hambatan teknis perdagangan (TBT) dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. untuk membentuk kerangka dan mekanisme untuk kerja sama teknis menyangkut standardisasi, penilaian kesesuaian, informasi teknis, pelatihan, dan bidang lain yang dimungkinkan dengan persetujuan para pihak.²⁴

C. Kebijakan Luar Negeri Di Bidang Pendidikan

Selain kerja sama ekonomi, RDTL juga melalui jalur diplomasi dengan perwakilan kedutaan besar Timor Leste di Jakarta,²⁵ bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh negara kepada mereka. Bahwasanya RDTL memutuskan untuk meningkatkan hubungan baik dengan Indonesia di sektor pendidikan, Seperti kita ketahui bahwa pasca kemerdekaan, Timor Leste mulai mengirim anak bangsa untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi di berbagai propinsi di Indonesia. Ada yang membiayai sendiri atau sumber keuangan pendidikan dari keluarga dan ada pula yang dikuliahkan melalui jalur prestasi beasiswa.

²⁴Memorandum saling pengertian antara badang standarisasi nasional RI dengan menteri perdagangan dan perindustrian RDTL. Jakarta 15 Agustus 2014, dalam bahasa Indonesia

²⁵<http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en#id>, diakses pada tanggal 6 November 2017

Semenjak merdeka tahun 2002 hingga sekarang, sudah sekitar ribuan pelajar Timor Leste yang menuntut ilmu di Indonesia, angka tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama di bidang pendidikan dengan aktor negara maupun non negara. Banyak sarjana yang telah memberi kontribusi untuk membangun bangsa RDTL dengan keahlian serta ilmu ketika kuliah di Indonesia. Rasanya belum cukup jika fungsi jalur diplomat dalam bidang pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat Timor Leste.²⁶ Delegasi Timor-Leste melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Gedung D Kemristekdikti Senayan Jakarta. Delegasi Timor-Leste terdiri dari Wakil Menteri Pendidikan Mr. Abel da Costa Ximenes, Atase Pendidikan Kedutaan Timor Leste, Mr. Thomas da Silva, Penasihat Wakil Menteri Pendidikan Daniel Pereira, dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Timor-Leste Ms. Maria Elsa Diogo Correia. Wakil Menteri Pendidikan Timor-Leste Mr. Abel menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang terjalin selama ini antara Timor-Leste dengan Republik Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Hal ini terutama dalam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Timor-Leste, karena secara langsung memberikan dampak yang besar

²⁶<http://timor-leste.gov.tl/?p=142&lang=en#id>, diakses pada tanggal 6 November 2017

bagi pertumbuhan pendidikan dan sumber daya manusia Timor Leste.²⁷

Jumlah mahasiswa Timor-Leste yang menempuh pendidikan di Indonesia berjumlah sekitar 7000 orang (*KBRI DILI*), yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut Wamendik Timor-Leste mayoritas masih didominasi dengan skema biaya pendidikan yang disediakan oleh masing-masing peserta dengan biaya sendiri, sedangkan biaya pendidikan melalui skema beasiswa dari pemerintah Timor Leste maupun Indonesia masih terbilang sedikit.

Pelajar Timor Leste dengan lulusan tahun 2000an telah mengalami kesulitan bahasa guna memperlancar proses belajar mengajar di Timor Leste maupun nantinya melanjutkan kuliah ke Indonesia. Hal ini ditindak lanjuti oleh Mohamad Nasir, beliau menyampaikan mekanisme pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka mendukung aktivitas mahasiswa Timor-Leste di Indonesia, menyarankan untuk memberikan pre-departure program sebelum calon mahasiswa Timor-Leste melanjutkan kuliahnya di Indonesia. Sehingga menjadi bekal bagi pelajar asal Timor Leste agar memudahkan dalam proses belajar.

Selanjutnya sehubungan dengan program beasiswa yang ada di Indonesia dan diperuntukan untuk para calon mahasiswa Timor-Leste, Wamendik Timor-Leste berharap program beasiswa berkelanjutan dan kemungkinan pembahasan aplikasi training

²⁷ <http://www.dikti.go.id/timor-leste-ingin-kembangkan-kerja-sama-di-bidang-pendidikan-tinggi-dengan-indonesia>, dikases pada tanggal 16 Juni 2017

bagi Timor-Leste di institusi-institusi penelitian di Indonesia dapat meningkat. Salah satu institusi pendidikan yang menarik perhatian Wamendik Timor-Leste adalah Politeknik Kapal Perikanan, melalui sistem dan materi pembelajaran yang terdapat di Politeknik Kapal Perikanan, diharapkan mahasiswa Timor-Leste yang menempuh pendidikan pada institusi tersebut dapat mendukung salah satu keunggulan dari negara Timor-Leste yaitu pada sektor perikanan dan kelautan.²⁸

D. Kebijakan Luar Negeri Di Bidang Politik

Pemerintah RDTL terus membenahi hubungan dengan pemerintah Indonesia melalui anggota diplomat Timor Leste, salah satunya dalam politik perbatasan, Timor Leste memilih berdialog dengan Indonesia untuk menetapkan titik batas yang merupakan bagian dari kedaulatan teritori negara. Sehingga aspek pertahanan tidak menjadi faktor untuk menghambat jalur kerja sama di bidang lain seperti sektor ekonomi dan pendidikan. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Stabilitas politik RDTL terhadap Indonesia dalam skala normal, semangat saling mendukung untuk terus menjaga existensi politik masing-masing jauh lebih baik dari tahun ke tahun. Tentu saja

²⁸ Ibid

keberhasilan konsep rekonsiliasi yang dilakukan oleh lembaga CAVR dan (komisi kebenaran dan rekonsiliasi) KKR.

Wujud stabilitas politik dan keamanan RDTL terhadap Indonesia makin mempertunjukkan kedewasaan kepada dunia internasional, terutama bukti kuat juga bagi negara anggota ASEAN lainnya bahwa Timor Leste meskipun baru merdeka, masih memiliki banyak kekurangan di seluruh aspek vital dalam negeri, namun kebijakan politik luar negerinya menunjukkan kemampuan sumber daya manusia untuk menjawab kekhawatiran masyarakat internasional, khususnya regional ASEAN.

Tahun 2011, pemerintah RDTL memulai menyepakati sebuah nota kesepahaman dalam kerja sama di dibidang Politik dengan Indonesia, kerja sama tersebut adalah:

1. pemerintah RDTL melakukan konsultasi bilateral tentang isu-isu strategis pertahanan dan militer yang menjadi kepentingan kedaulatan negara, pertukaran informasi dalam bidang pertahanan, meningkatkan kerja sama angkatan bersenjata, kerja sama dukungan logistic.
2. Pembentukan komite bersama dalam bidang pertahanan.
3. Kewajiban untuk saling melindungi hak kekayaan intelektual, informasi, peralatan, dokumen, dan bahan yang bersifat rahasia.
4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi Para Pihak dalam komite bersama serta tidak membawa setiap sengketa yang timbul ke pengadilan

internasional dan apabila diperlukan akan diselesaikan melalui *saluran diplomatik*.²⁹ Kerja sama tersebut di tandai dengan tangani langsung oleh menteri pertahanan Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmão.

Satu dekade lebih kemerdekaan Timor Leste diwarnai dengan dinamika politik yang tidak dapat diprediksi kemana arahnya. Satu dekade lebih pula Timor Leste menjalin kerjasama-kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN, meskipun Timor Leste sendiri tak kunjung diterima komisi ASEAN menjadi salah satu anggota.

E. The Indonesia-Timor Leste Friendship Forum

The Indonesia-Timor Leste friendship forum merupakan salah satu agenda kebijakan luar negeri Timor Leste yang sangat mendorong kuat dalam menjalin kerja sama bilateral. Komisi persahabatan dan kebenaran sebagai mekanisme untuk mengagendakan kebijakan politik luar negeri Timor Leste, walaupun inisiatif awal berasal dari kedua negara dengan motivasi menciptakan masyarakat yang rukun tertib dan sejahtera. Satu dekade sudah hubungan kerja sama kedua negara begitu harmonis dan erat.³⁰ Pendidikan, ekonomi dan politik menjadi triger utama dalam hubungan yang terus membaik dan meningkat dari tahun ke tahunnya.

²⁹ Agreement between Government of RI and RDTL, concerning cooperative activities in the field of defence, Dili 19 Agustus 2011

³⁰<https://www.hart-uk.org/blog/indonesia-and-timor-leste-from-occupation-to-cooperation/>, diakses pada tanggal 7 Nov 2017

Mantan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão mempertegas pengembangan hubungan politik, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, komunikasi, pariwisata dan industry dengan Indonesia harus dilakukan secara intensif dan konsistensi. Isu tentang peningkatan kapasitas pendidikan, pertanian dan perikanan menjadi prioritas bagi Timor Leste. Pemerintah Timor Leste melalui Xanana juga telah memenuhi keinginan untuk membeli peralatan militer dari Indonesia yang tersedia, guna menjaga isu politik pertahanan.

Terbentuknya *Indonesia-Timor Leste Friendship Forum* pada tahun 2002-2005, merupakan sarana untuk memfasilitasi kedua pemerintah, terutama Timor Leste untuk lebih membuka diri dalam jaringan hubungan internasional dan kebijakan politik luar negerinya untuk bisa menyesuaikan kondisi ekonomi, politik kontemporer. Forum tersebut memberikan semangat nasionalis dan patriotisme bagi pemimpin kedua negara untuk menyadari betapa pentingnya kondisi kerja sama di segala aspek kehidupan kedua masyarakat. Indonesia -Timor Leste Friendship Forum berhasil meraih hati para pemimpin terkait seperti, Xanana Gusmão, SBY dan B.J Habibie untuk lebih mementingkan perdamaian dan solidaritas antara kedua pemerintah dan masyarakat dari pada saling mencari kesalahan yang berhubungan dengan jajak pendapat antara pro integrasi dan pro kemerdekaan.

Indonesia-Timor Leste Friendship Forum memberikan kesempatan bagi kedua pemerintah dan masyarakat untuk mengekspresikan pengalaman apa yang terjadi pada masa lampau, berkaitan dengan pelanggaran-pelangaran yang mewarnai jalannya jajak pendapat sampai pada kemerdekaan. Arti rekonsiliasi mempersatukan saling menerima bukan menyudutkan dan menghakimi karena suatu peristiwa adanya hubungan klausal sehingga membutuhkan pemahaman komprehensif untuk bisa menerima kondisi apa saja yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste.

Xanana sebagai saksi ahli dalam kemerdekaan Timor Leste, Xanana merupakan tokoh utama yang melakukan mobilisasi menuju independen Timor Leste, oleh sebab itu, Xanana sangat dibutuhkan dalam Forum tersebut untuk memberikan keterangan dengan kepercayaan penuh dan memuji konsistensinya pada pengadilan tinggi hak asasi manusia. Kontribusi dari para jenderal terkait seperti Wiranto juga merupakan tokoh dan aktor vital dalam forum persaudaraan dan kebenaran tersebut.

Aktor-aktor non negara yang terlibat seperti organisasi regional ASEAN, INGO, NGO dan UNTAET juga memiliki pengaruh kuat dalam proses pencarian kebenaran antara Timor Leste dengan Indonesia. Mereka bekerja sesuai dengan mandatnya masing-masing, kehadirannya telah memberikan dampak positif terhadap proses pencarian fakta dan pemulihan

mental politikus dan aktor masa lalu yaitu masyarakat, individu dan kelompok yang terlibat langsung.

Salah satu tujuan Xanana Gusmao merealisasikan forum tersebut agar dengan secepatnya memulihkan kembali hubungan kerja sama dengan Indonesia, karena Xanana menyadari bahwa sebagai negara baru Timor Leste bakal membutuhkan bantuan-bantuan internasional yang lebih banyak untuk membangun Timor Leste, terutama negara-negara tetangga tentu saja Indonesia, Australia dan negara donor lainnya yang bersedia membantu. Suatu kebanggaan bagi masyarakat dan pemerintah Timor Leste pasca pemulihan hubungan persaudaraan dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia di era B.J Habiebie, dan rasa solidaritas saling bahu membahu semakin meningkat dan bertambah dengan bantuan sarana dan prasarana di era Megawati sampai pada SBY, justru Xanana lebih mengorientasikan pemerintahan RDTL untuk tetap menjaga konsistensi dan rasa hormat atas hubungan dengan Indonesia, beliau memberikan kesempatan kepada aktor non negara untuk ikut merealisasikan hubungan kerja sama dengan Indonesia seperti “*people to people relationship*” sebagaimana kedua negara menganut demokrasi, sehingga masyarakat ikut ambil bagian dan terlibat dalam menyelenggarakan negara menuju tujuan kehidupan yang layak dan sejahtera.

The Indonesia-Timor Leste friendship forum dinilai memberikan kontribusi yang signifikan bagi Timor Leste dan

Indonesia, paska jajak pendapat yang diikuti dengan kerususan dan kerusakan yang begitu masif terjadi di kota Dili, meninggalkan kisah yang memiluhkan antara masyarakat kedua negara, terutama aktor dan kelompok-kelompok yang terlibat langsung di arena politik referendum Timor Leste. *The Indonesia-Timor Leste friendship forum* di dukung oleh PBB melalui misinya di Timor Leste yaitu UNTAET yang mendorong dan memberikan sumbangsih berupa moril dan materil sehingga forum tersebut dinilai sangat cepat untuk diselenggarakan oleh kedua pemerintah.

Pihak-pihak yang terlibat kerusuhan paska jajak pendapat seperti pelaku dan korban dari politik referendum Timor Leste di panggil dalam forum tersebut untuk memberikan keterangan yang bersifat transparansi dan dengan hati damai, sehingga akan cepat memulihkan kembali hubungan kedua masyarakat.